

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Perencanaan manajemen lingkungan hidup Industri Roti *Mr. Bread* PT. Indomarco Prismatama sudah tersusun. Matriks Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) tahap konstruksi sampai tahap operasional yang sudah dibuat menjadi pedoman bagi perusahaan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

6.2. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan dalam pelaksanaan perencanaan manajemen lingkungan yang sudah disusun adalah :

- a. Regulasi hukum yang digunakan sebagai acuan perencanaan manajemen lingkungan hidup selalu diperiksa dan diperbaharui masa berlakunya.
- b. Partisipasi dan komunikasi dari pemrakarsa, pemerintah dan masyarakat diperlukan agar manajemen lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat komitmen dan pelaporan tertulis terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan manajemen lingkungan hidup yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2014). *Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi di Yogyakarta Tahun 2014 No. 11/02/34/Th.XVII, 5 Februari 2015*. Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Bupati Sleman (2004). *Keputusan Bupati Sleman Nomor 17 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta.
- Bupati Sleman (2005). *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025*. Yogyakarta.
- Bupati Sleman (2005). *Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 tentang Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan*. Yogyakarta.
- Bupati Sleman (2012). *Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 tentang Tahapan Pemberian Izin*. Yogyakarta.
- Bupati Sleman (2012). *Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung*. Yogyakarta.
- Bupati Sleman (2014). *Keputusan Bupati Sleman Nomor 169.IPT/Kep.KDH/A/2014 Izin Pemanfaatan Tanah PT. Indomarco Prismatama di Padukuhan Salakan, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Seluas 1.735 m² 12 November 2014*. Yogyakarta.
- Damanhuri, E., dan Padmi T. (2010). *Pengelolaan Sampah*. Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Bandung : ITB.
- Darsono, V. (2012). *Sistem Manajemen Lingkungan Waroeng Steak dan Shake*. (Penelitian). Badan Lingkungan Hidup Sleman. Yogyakarta.
- Darsono, V. (2013). *Panduan Pengelolaan Green Industry*. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (1997). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya (2004). *Profil Kota Yogyakarta*. Yogyakarta.

- Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1996). *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*. Jakarta.
- Gubernur DIY (2002). *Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 153 tentang Baku Mutu Udara Ambien*. DIY.
- Hammer, S. M. (1997). *Operation of Wastewater Treatment Plants* (Ed. 4). California State University. U.S.
- Hidayat, M. N. (2011). Sistem Manajemen Lingkungan untuk Memperoleh Sertifikasi ISO 14001 di PT. Trakindo Utama Surabaya. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 8(1), 50–57.
- Homburger W.S. James H Kell and David D. Perkins, *Fundamental of Traffic Planning Engineering*, 13 Th edition, Institute of Transportation Studies, University of California at Berkeley, 1992.
- Keraf, S. A. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Kubacka, M. (2012). The Role of Local Association of Communes in Environmental Management Systems: Selected Case Studies in the Wielkopolska Region. *Polish Journal of Environmental Studies*, 21(5), 1287–1293.
- Menteri Dalam Negeri (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan*. Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI (1990). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air*. Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI (2002). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri*. Jakarta.
- Menteri Kesehatan RI (2010). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum*. Jakarta.
- Menteri Negara Lingkungan Hidup (1995). *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri*. Jakarta.
- Menteri Negara Lingkungan Hidup (2009). *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 tentang Pemanfaatan Air Hujan*. Jakarta.

Menteri Negara Lingkungan Hidup (2010). *Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup*. Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum. (2006). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum*.

Menteri Pekerjaan Umum. (2006). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun 2007*. Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum (2008). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran dan Bangunan Gedung dan Lingkungan*. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta.

Menteri Pekerjaan Umum (2013). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Jakarta.

Menteri Perhubungan (2006). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan*. Jakarta.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1980). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja*. Jakarta.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (1980). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan*. Jakarta.

Menteri Tenaga Kerja (1989). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir*. Jakarta.

Pemerintah DIY (2010). *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. DIY.

- Pemerintah DIY (2012). *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tentang Bangunan Gedung*. Yogyakarta.
- Pemerintah Kabupaten Sleman (2001). *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah*. Yogyakarta.
- Pemerintah Kabupaten Sleman (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031*. Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tentang Izin Lingkungan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tentang Sumber Daya Air*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tentang Tenaga Kerja*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- Setiaji, J. P., dan Harjanti (2013). *Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Pengolahan Roti pada PT. XYZ*. Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen. Surabaya : Universitas Kristen Petra.
- Srikandi, N., dan Driejana (2009). Pengaruh Karakteristik Faktor Emisi Terhadap Estimasi Beban Emisi Oksida Nitrogen (NOx) dari Sektor Transportasi. *Faculty of Civil and Environmental Engineering*. Bandung : ITB.
- Standar Nasional Indonesia 03-1746-2002 *Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Keluar untuk Penyelamatan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung*. 29 Desember 2000. Jakarta.
- Standar Nasional Indonesia 03-2398-2002 *Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Sistem Resapan*. 5 September 2012. Jakarta.

Standar Nasional Indonesia 03-2453-2002 *Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan*. 5 September 2002. Jakarta.

Standar Nasional Indonesia 3242-2008 *Pengelolaan Sampah di Permukiman*. 27 April 2006. Jakarta.

Sugiharto, C. F. (2014). *Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dengan menyusun UKL-UPL di PT. Comradindo Lintasnusa Perkasa*. (Skripsi). Yogyakarta.

Suhadi, D. (2008). *Penyusunan Petunjuk Teknis Perkiraan Beban Pencemaran Udara dari Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup.

Tamin, Z. (1997). *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Bandung: Jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung.

Tchobanoglous and Eliassen (1979). *Waste Water Engineering, Treatment, Disposal, Re Use*. New York: McGraw-Hill.

Thompson, L. M. (2009). *Creating a culturally relevant environmental management system for a metis workplace*. University of Manitoba.

Tias, N. P. (2009). *Efektivitas pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Kudus*. Universitas Diponegoro Semarang.

Valentino, R. (2014). *Perencanaan Sistem Manajemen Lingkungan Pondok Wisata dan Rumah Makan Lokal*. (Skripsi). Sleman, Yogyakarta.

Walikota Yogyakarta (2007). *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan*. Yogyakarta.